

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk yang mengakibatkan kota terus berkembang. Aktivitas penduduk berlangsung sangat cepat dan mengakibatkan kota menjadi padat serta kebutuhan sarana prasarana meningkat. Kepadatan penduduk yang pesat mengakibatkan alih fungsi lahan di berbagai aspek seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, fasilitas, sosial, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur yang meningkat setiap tahunnya berdampak pada lingkungan fisik seperti penggunaan lahan yang awal fungsi utamanya sebagai daerah penampung air sementara dan bantaran sungai beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman mengakibatkan air yang meresap ke tanah menjadi berkurang dan mengalir ke saluran drainase. Apabila saluran tidak dapat berfungsi dengan baik maka dapat mengakibatkan banjir.

Faktor penyebab banjir dapat disebabkan akibat dari kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya juga dapat disebabkan akibat tindakan manusia¹. Banjir memberikan dampak antara lain dampak ekonomi, sosial, fisik dan lingkungan:

¹ Wahyu Rio Santoso, (2014), *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru*, Jom FISIP Volume 1 No. 2. Hal 2

Dampak ekonomi atau finansial meliputi kerugian material, terganggunya kegiatan ekonomi, kemampuan kerja, terlambat masuk kerja atau terhambatnya pengangkutan barang. Dampak sosial meliputi kematian, risiko kesehatan, trauma psikologis, resesi ekonomi, terganggunya kegiatan pendidikan bagi anak yang tidak dapat bersekolah, terganggunya pelayanan publik, kekurangan pangan, energi, air dan kebutuhan dasar lainnya. Dampak fisik dapat terjadi dengan kerusakan akibat banjir terhadap prasarana umum dan kantor pelayanan. Dampak lingkungan termasuk pencemaran air dari polutan yang dibawa oleh banjir atau vegetasi di sekitar sungai yang rusak akibat banjir². Salah satu kota mengalami permasalahan banjir adalah kota Semarang.

Berdasarkan data BPBD Kota Semarang tercatat antara tahun 2015-2019 banjir di Kecamatan Gayamsari terjadi sebanyak 11 kali, 6 diantaranya terjadi di Kelurahan Tambakrejo. Faktor yang menjadi pengaruh banjir di Kelurahan Tambakrejo yaitu terjadinya limpahan air di Sungai Tenggang. Sungai tersebut memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 25.475Km². Bagian hulu sungai tersebut terletak di Kecamatan Pedurungan, bagian hilir terletak di Kecamatan Genuk, dan bagian lain sungai terletak di Kecamatan Gayamsari. Kawasan tersebut merupakan salah satu pendukung perekonomian Kota Semarang. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari termasuk kedalam Bagian Wilayah Kota (BWK) V yaitu pemanfaatan wilayah sebagai

² Claudio T F Lengkey, Masje Siliya Pangkey, Very Yohanis Londa, (2020), *Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. Hal 42

pemukiman campuran antar perdagangan dan perkantoran serta industri³. Banjir tidak hanya lokasinya yang berada di pesisir Kota, aktifitas penduduk di bantaran Sungai Tenggang ikut memberikan dampak terjadinya banjir. Mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang mengharuskan untuk mendirikan tempat tinggal baru, pendirian bangunan liar di bantaran sungai, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk kecamatan Gayamsari mencapai 73,954 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Gayamsari menghasilkan limbah sampah sebesar 0,79 kg/orang/hari. Tingkat pelayanan sampah oleh pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Gayamsari hanya mencapai 46%, hal ini menunjukkan sebesar 54% sampah belum terkelola dan kemungkinan dibuang di lingkungan⁴. Jumlah penduduk disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari



Sumber: Dinas Kependudukan Kota Semarang, 2019

³ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

⁴ Vidya Ayuningtyas, Syafrudin, Wiharyanto Oktiawan. Tanpa tahun. *Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang*. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Pemerintah Kota untuk dapat menjadikan daerah dan masyarakat terhindar bencana banjir telah melakukan upaya dalam penanggulangan bencana banjir. Salah satunya membentuk BPBD dalam kegiatannya yang meliputi menganalisis pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Seperti Kegiatan penanggulangan banjir meliputi aspek perencanaan, pencegahan, pengelolaan risiko, dan tanggapan terhadap kejadian bencana baik sebelum maupun sesudah terjadi bencana. Program Kesiapsiagaan dalam bentuk penanggulangan atau pencegahan bencana banjir yang dilakukan pemerintah Kota Semarang, salah satunya adalah pembuatan dan pemaksimalan sistem darainase di sungai-sungai yang sering meluap dan mengakibatkan banjir. Sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Banjir Kanal Timur, Sungai Tenggang, Sungai Sringin, Sungai Babon, dan Sungai Pedurungan. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sebagai Pengandali Banjir. Program-program tersebut tidak ada artinya tanpa peran masyarakat dalam hal partisipasi nyata karena masalah banjir tidak akan selesai kecuali masyarakat mendukung program pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat adalah partisipasi sukarela masyarakat dalam perubahan yang dipaksakan sendiri. Tugas langsung masyarakat adalah membantu langkah-langkah yang dapat diterapkan. Pada saat yang sama, peran tidak langsung berupa dukungan finansial, intelektual, dan material yang diperlukan. Peran masyarakat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, pemanfaatan

dan pemeliharaan, pengembangan hasil pembangunan serta pengawasan dan penilaian terhadap hasil pembangunan⁵.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya alih fungsi lahan dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tanpa mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dapat mengakibatkan bencana, salah satunya adalah bencana banjir. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang melibatkan masyarakat dalam rangka mengurangi bencana banjir, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat di bantaran Sungai Tenggang agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanggulangan banjir, yang dituangkan dalam judul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TENGGANG KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mendapatkan perumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen bencana banjir yang dilakukan masyarakat Daerah Aliran Sungai Tenggang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Daerah Aliran Sungai Tenggang dalam penanggulangan bencana?

⁵ Mikkelsen, (2003), *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya. Pemberdayaan. (Penerjemah: Matheos Nalle)*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal.64

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran masyarakat dalam menanggulangi banjir di bantaran Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dalam menanggulangi banjir di bantaran Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pengetahuan serta keilmuan untuk kepentingan negara, terutama kajian dalam bidang kebijakan penangganan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai pengendali banjir di Kota Semarang.
2. Memberikan kontribusi pengetahuan serta keilmuan terutama dalam kajian peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis
Untuk memenuhi tugas skripsi dalam sebagai syarat kelulusan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari hasil pembelajaran sudi Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro.
2. Bagi Universitas Diponegoro

Menambah referensi pada Perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro dan dapat dijadikan sebagai kajian atau penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Memberikan informasi dan masukan tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

1.5 Kerangka pemikiran teori

1.5.1 Teori Manajemen Bencana

A. Pengertian Teori Manajemen Bencana

Bencana merupakan sebuah gangguan terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, lingkungan, dan melampaui kemampuan sumberdaya. Bencana merupakan gabungan dari ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Tindakan manusia sangat memengaruhi keadaan bencana dalam menghadapi dan menanggulangi bencana⁶.

Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Manajemen bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan risiko yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pada tahap pasca bencana. Manajemen bencana terdiri dari tiga tahap yaitu pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana), dan

⁶ <https://disaster.geo.ugm.ac.id/index.php/berita/istilah-manajemen-bencana> Diakses pada tanggal 23 Mei 2021

pasca bencana. Tahap pra bencana berupa mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Tahap tanggap darurat meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan pengungsian, dan pemberian bantuan darurat. Tahap pasca bencana merupakan tahap pemulihan yang terdiri dari rehabilitasi, dan rekonstruksi. Strategi manajemen kebencanaan dapat berupa teknis atau rekayasa maupun non teknis atau peraturan perundang-undangan⁷.

B. Aspek-Aspek Kebencanaan

Parameter bencana merupakan bagian dari pemahaman aspek bencana seperti bahaya, kerentanan, kerawanan, dan risiko.

1. Bahaya (*Hazard*)

Bahaya adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, lingkungan, manusia, kegiatan ekonomi atau potensi kerugian. Bahaya muncul dari interaksi antara alam, manusia, teknologi dan karakteristik daerah⁸.

2. Kerawanan (*Vulnerability*)

Merupakan kondisi geologis, biologis, hidrologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, dan menghadapi bahaya tertentu.

3. Kerentanan (*Susceptibility*)

⁷ Sudibyakto. (2011), *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University PRES

⁸ Pine, (2009), *Natural Hazard Analysis : Reducing The Impact of Disaster*. CRC : Boca Raton

Merupakan kondisi yang dipengaruhi dari bahaya yang berasal dari alam, teknologi, dan kondisi ekstrem tertentu. Kerentanan dapat mencakup kerentanan lingkungan, kerentanan ekonomi, dan kerentanan sosial⁹, merupakan timbulnya akibat buruk yang dapat mengakibatkan kemungkinan kerugian dalam kerusakan lingkungan, infrastruktur, luka-luka hingga kematian. Risiko dapat terjadi karena adanya interaksi antara ancaman dan kerentanan¹⁰.

Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghindari, menghadapi, dan memulihkan dari bencana. Pada dasarnya tujuan penanggulangan bencana adalah untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana, baik dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa maupun dengan mengatasi kerentanan¹¹.

C. Model Manajemen

Model manajemen bencana dibagi menjadi lima, yaitu:

1. *Disaster Management Continuum model.*

Tahap-tahap manajemen bencana dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, and early warning.*

2. *Pre-during-post disaster model*

⁹ *Ibid*

¹⁰ International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), (2004), *Dalam Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)*

¹¹ Sambodo, (2018), *Manajemen Bencana*. Retrieved from endrosambodo1984.wordpress.com/2012/04/18/manajemen-bencana/diakses 6 Desember 2021

Model penanggulangan bencana ini membagi langkah-langkah tindakan seputar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama terjadi bencana, dan sesudah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.

3. *Contract-expand model*

Model ini mengasumsikan bahwa seluruh tahapan penanggulangan bencana harus terus dilakukan di daerah rawan bencana. Perbedaan antara bencana dan nonbencana adalah pada saat bencana fase tertentu lebih berkembang sedangkan fase lainnya kurang ditekankan.

4. *The crunch and release model*

Penanggulangan bencana ini menekankan pada upaya pengurangan kerentanan untuk mitigasi bencana. Jika masyarakat tidak rentan, kemungkinan terjadinya bencana rendah, meskipun bahayanya masih ada.

5. *Disaster risk reduction framework*

Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana, baik dalam bentuk kerentanan maupun dalam mengembangkan kapasitas untuk pengurangi risiko tersebut.

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghadapi bencana dengan menerapkan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, terdapat lima model manajemen bencana yaitu *Disaster Management Continuum model*, *Pre-during-post disaster model*, *Contract-expand model*, *The crunch and release model*, *Disaster risk reduction framework*. Kegiatan manajemen bencana tersebut dipengaruhi oleh parameter bencana berupa bahaya, kerentanan, kerawanan, dan risiko.

Manajemen bencana dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan¹².

Pertama tahap **Pra Bencana** yang terdiri dari:

1. Kesiapsiagaan

Upaya pemberdayaan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) untuk mengatasi bahaya fenomena alam dengan membentuk struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis yang tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan kerusakan pelayanan publik.

2. Mitigasi

Serangkaian tindakan yang dilakukan secara dini dalam menanggapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan.

¹² Soehatman, 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat hal.30

3. Peringatan dini

Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu¹³.

Kedua tahap **Saat Bencana/Tanggap Darurat** yaitu serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (*damage and needs assessment*), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana.

Tahap tanggap darurat bertujuan sebagai:

1. Menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia
2. Mengurangi penderitaan korban bencana
3. Meminimalkan kerugian materia

Ketiga tahap **Pasca Bencana** yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi¹⁴.

1. Rehabilitasi

Serangkaian kegiatan dapat membantu korban melanjutkan kehidupan normal, kemudian berintegrasi kembali ke dalam fungsi sosial yang ada. Termasuk merawat korban trauma.

2. Rekonstruksi

Melalui berbagai tindakan untuk memulihkan keadaan sebelum bencana, antara lain pembangunan infrastruktur, revitalisasi akses ke

¹³ Purnama, (2017), *Manajemen Bencana*. Modul Program Studi Kesehatan Masyarakat, Udayana, Bali hal 8

¹⁴ Nugroho Radit Bakti, Mochamad Mustam, Dyah Lituhayu, (2015), *Manajemen Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang*. *Jurnal FISIP UNDIP Volume 4, Nomor 1*. Hal 2

sumber daya ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, orientasi pembangunan di satu sisi untuk mengurangi dampak bencana dan di sisi lain menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

1.5.2 Teori Partisipasi

A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. I Nyoman Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹⁵ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) mengemukakan partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya¹⁶.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam

¹⁵ Sumaryadi, I. Nyoman, (2010), *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor. Penerbit: Ghalia Indonesia. Hal. 23

¹⁶ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, hal 201-202

proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya¹⁷. Dari pengertian tersebut jelas bahwa partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan, perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki hak untuk menilai pendapatnya tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Dalam partisipasi ini, masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar yang menjadi sumber kebutuhan dan penghidupan masyarakat setempat.

Pentingnya partisipasi masyarakat adalah merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat. Oleh sebab itu perlu diperhatikan sifat dan ciri-ciri partisipasi yaitu:

1. Kemungkinan untuk berpartisipasi harus mendapatkan informasi yang jelas dan memadai tentang setiap aspek pelaksanaan program.
2. Partisipasi masyarakat dalam penentuan nasib sendiri harus multi level, multi bagian, matang, bermakna dan berkelanjutan.
3. Partisipasi bersifat sukarela.
4. Isu dan masalah haruslah disajikan secara jelas dan objektif¹⁸.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi

Keterlibatan anggota masyarakat dalam segala jenis aktivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan dikerjakan dalam masyarakat lokal. Bentuk-bentuk partisipasi nyata yaitu:

¹⁷ H.A.R.Tilaar, (2009), *Kekuasaan pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta. Hal 208

¹⁸ Sastropetro, RA Santoso, (1998), *Partisipasi Komunikasi, Persuasim dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung. Hal 23

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
5. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya¹⁹.

Bentuk partisipasi dibedakan menjadi empat jenis yaitu²⁰:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan)

¹⁹ Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.38

²⁰ Cohen and Uphoff. (1977) yang dikutip Kalesaran(2015) Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado, *e-Journal "Acta Diurma" Vol.IV.No.5*

2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dengan penentuan alternatif yang berkaitan dengan ide-ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan berupa ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Berkaitan dengan hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan kuantitas dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu pembangunan yang dinikmati masyarakat, baik pembangunan fisik maupun non fisik²¹.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah

²¹ Cohen and Uphoff. (1977), *Rural Development Participation*. Cornell University. New York. Hal 6

direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Penelitian ini mengacu pada teori Cohen dan Uphoff tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain:

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. pelaksanaan peran masyarakat merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan²².

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berperan.

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan sosial yang ada. Orang paruh baya hingga lanjut usia yang secara moral berkomitmen pada nilai dan norma masyarakat lebih bersedia untuk berpartisipasi daripada orang di usia lain.

²² *Ibid*

b. Jenis kelamin

Nilai-nilai yang sudah lama ada dalam budaya berbagai bangsa menyatakan bahwa tempat perempuan pada hakekatnya adalah “di dapur”, yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat tugas utama perempuan adalah mengurus rumah, namun nilai peran semakin meningkat. Seorang wanita telah berubah. dengan gerakan emansipasi dan peningkatan pendidikan wanita.

c. Pendidikan

Ini harus menjadi salah satu syarat mutlak partisipasi. Diyakini bahwa pendidikan dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungannya, yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang menentukan berapa besar pendapatan yang diterimanya. Pekerjaan yang baik dan penghidupan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, hal ini berarti partisipasi dalam kegiatan didukung oleh iklim ekonomi yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Waktu seseorang tinggal di lingkungan tertentu dan pengalaman mereka berinteraksi dengan lingkungan mempengaruhi keterlibatan mereka. Semakin lama seseorang tinggal di suatu lingkungan tertentu,

semakin tercermin rasa memiliki terhadap lingkungan dalam partisipasi penuhnya dalam semua aktivitas lingkungan.

D. Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Tabel 1.2
Data Kelurahan Siaga Bencana (KSB) 2020

NO	KSB/ KELURAHAN	KECAMATAN	ANCAMAN BENCANA	BENTU KAN TAHUN
1.	Jagalan	Semarang Tengah	Kebakaran & Banjir	2011
2.	Bandarharjo	Semarang Utara	Banjir / Rob	2011
3.	Tanjung Mas	Semarang Utara	Banjir / Rob	2011
4.	Kemijen	Semarang Timur	Banjir / Rob	2011
5.	Kaligawe	Gayamsari	Kebakaran & Banjir	2011
6.	Randusari	Semarang Selatan	Tanah Longsor	2011
7.	Kembangarum	Semarang Barat	Tanah Longsor	2011
8.	Muktiharjo Lor	Pedurungan	Banjir / Rob	2011
9.	Muktiharjo Kidul	Pedurungan	Banjir	2011
10.	Lempong Sari	Gajah Mungkur	Tanah Longsor	2011
11.	Rowosari	Tembalang	Banjir/ Kekeringan	2011
12.	Tinjomoyo	Banyumanik	Tanah Longsor	2011
13.	Sukorejo	Gunungpati	Tanah Longsor/Gerak	2011
14.	Kedungpane	Mujen	Longsor/ Kekeringan	2011
15.	Wonosari	Ngaliyan	Longsor, Sungai Meluap	2011
16.	Jomblang	Candisari	Tanah Longsor	2011
17.	Wates	Ngaliyan	Banjir Bandang	2013
18.	Gondoriyo	Ngaliyan	Banjir Bandang	2013
19.	Beringin	Ngaliyan	Banjir Bandang	2013
20.	Tambak Aji	Ngaliyan	Banjir Bandang	2013
21.	Mangkang Wetan	Tugu	Banjir Bandang	2013
22.	Mangunharjo	Tugu	Banjir Bandang	2013
23.	Candi	Candisari	Tanah Longsor	2017
24.	Kalipancur	Ngaliyan	Longsor/Banjir	2011
25.	Meteseh	Tembalang	Kebakaran & Banjir	2017
26.	Genuksari	Genuk	Banjir /Rob	2017
27.	Mangkang Kulon	Tugu	Banjir/ Rob	2017
28.	Ngemplak Simongan	Semarang Barat	Banjir/ Longsor	2017
29.	Krobokan	Semarang Barat	Banjir Bandang	2017
30.	Manyaran	Semarang Barat	Banjir Bandang	2017

31.	Bulustalan	Semarang Barat	Banjir Bandang	2017
32.	Cabean	Semarang Barat	Banjir Bandang	2017
33.	Petompon	Gajah Mungkur	Banjir Bandang	2017
34.	Panggung Lor	Semarang Utara	Banjir Bandang	2017
35.	Bulu Lor	Semarang Utara	Banjir Bandang	2017
36.	Pudak Payung	Banyumanik	Tanah Longsor	2018
37.	Trimulyo	Genuk	Banjir Rob	2018
38.	Purwoyoso	Ngaliyan	Tanah Longsor	2018
39.	Gajahmungkur	Gajahmungkur	Tanah Longsor	2018
40.	Mlatiharjo	Smg Timur	Banjir Rob	2018
41.	Tambakrejo	Gayamsari	Banjir/Rob	2019
42.	Sawah Besar	Gayamsari	Banjir/Rob	2019
43.	Gedawang	Banyumanik	Tanah Longsor	2019
44.	Karangroto	Genuk	Banjir/Rob	2019
45.	Pongangan	Gunungpati	Tanah Longsor	2019
46.	Jabungan	Banyumanik	Tanah Longsor	2019
47.	Sadeng	Gunungpati	Tanah Longsor	2019
48.	Tegalsari	Candisari	Tanah Longsor	2019
49.	Banjardowo	Genuk	Banjir/Rob	2019
50.	Srondol Wetan	Banyumanik	Tanah Longsor	2019
51.	Bendan Duwur	Gajahmungkur	Tanah Longsor	2020
52.	Bendan Ngisor	Gajahmungkur	Tanah Longsor	2020
53.	Srondol Kulon	Banyumanik	Tanah Longsor	2020
54.	Ngesrep	Banyumanik	Tanah Longsor	2020
55.	Jangli	Tembalang	Tanah Longsor	2020
56.	Tandang	Tembalang	Tanah Longsor	2020
57.	Randu Garut	Tugu	Banjir Kiriman	2020
58.	Tugurejo	Tugu	Banjir Kiriman	2020
59.	Bongsari	Semarang Barat	Tanah Longsor	2021
60.	Mlati Baru	Semarang Timur	Banjir/Rob	2021
61.	Tembalang	Tembalang	Tanah Longsor	2021
62.	Gebangsari	Genuk	Banjir/Rob	2021
63.	Penggaron Kidul	Pedurungan	Banjir	2021
64.	Kuningan	Semarang Utara	Banjir	2021

Sumber: <http://bpbd.semarangkota.go.id> › KSB_2021_1. Diolah peneliti.

Data tersebut menunjukkan bahwa kelurahan yang tergabung dalam Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kota Semarang sebanyak 64 kelurahan tahun 2020. Dalam urutan ke 41 terdapat Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari yang menunjukkan ancaman bencana berupa Banjir dan Rob.

E. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014.

Keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat Indonesia dalam segala aspek penanggulangan bencana. Partisipasi kota dalam perlindungan banjir diatur secara resmi dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 11/2014). Peraturan ini merupakan mandat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2007), dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22/2008). Perka BNPB No. 11/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta.

Tujuan Perka BNPB No. 11/2014 adalah untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara efisien, efektif dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat di sini adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Padahal pengertian masyarakat itu sendiri adalah suatu komunitas yang saling bergantung dan hidup bersama dalam suatu komunitas yang terorganisasi.

Masyarakat dapat terdiri dari perseorangan atau berkumpul dalam suatu organisasi/lembaga, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Tingkat individu merupakan bentuk implementasi sebagai warga negara Republik Indonesia agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam penanggulangan bencana. Masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam penanggulangan bencana bersama dengan pemerintah dan dunia usaha. Penanggulangan bencana perkotaan memiliki hak dan kewajiban. Setiap masyarakat memiliki hak untuk:

1. Memperoleh perlindungan sosial dan rasa aman, terutama bagi kelompok rawan bencana.
2. Mendapatkan pelatihan, pendidikan dan keterampilan untuk mengimplementasikan penanggulangan bencana.
3. Dapatkan pengetahuan tertulis dan lisan tentang praktik manajemen bencana.
4. Berpartisipasi dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial.
5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penanggulangan bencana, terutama dalam kegiatan yang mempengaruhi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.
6. Melakukan pemantauan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penanggulangan yang telah ditentukan.

Selain itu, setiap orang yang terancam bencana berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kompensasi atas bencana yang

disebabkan oleh kekurangan konstruksi. Pada saat yang sama, tugas setiap orang meliputi:

1. Untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan dan fungsi lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
3. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengambilan keputusan, penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat, pemantauan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program kegiatan penanggulangan bencana. Bagi perorangan pembentuk organisasi/lembaga yang berbadan hukum, dibentuk khusus untuk penanggulangan bencana dan bersifat sukarela dalam segala hal termasuk pendirian, tujuan dan program. Pelibatan masyarakat dalam bentuk organisasi/lembaga harus dilakukan melalui pendekatan persuasif dan mengadopsi model gerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini, serta tahap rehabilitasi dan pemulihan pascabencana. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara individu atau bersama-sama dengan mitra dan mengutamakan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Untuk implementasi di lapangan,

organisasi/unit tanggap bencana harus membuat nota kesepahaman antara organisasi/unit terkait dengan BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencakup wilayah kerja, kapasitas sumber daya, dan praktik penanggulangan bencana.

Rencana aksi tahap prabencana Nota Kesepahaman mengusulkan tindakan dalam wilayah kerja organisasi/badan untuk mengurangi atau meniadakan risiko bencana, baik dengan mengurangi risiko bencana atau mengurangi kerentanan suatu pihak pada risiko bencana. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Identifikasi dan pantau risiko bencana.
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara partisipatif.
3. Mengembangkan budaya sadar bencana.
4. Mitigasi dan pencegahan sebagai pengurangan ancaman dan kerentanan.
5. Mengatur, memasang dan menguji sistem peringatan dini.
6. Mengorganisir, mengkonsultasikan, melatih dan mengulang mekanisme tanggap darurat.
7. Penyebarluasan berita mengenai peringatan bencana, penyiapan jalur evakuasi.
8. Memantau pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
9. Pengembangan infrastruktur dan peralatan medis dan psikologis.

Rencana aksi pascabencana memuat rekomendasi tindakan organisasi/kelembagaan di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan

segala aspek pelayanan publik, masyarakat atau masyarakat sebagaimana mestinya, serta membangun kembali seluruh prasarana dan sarana kelembagaan di wilayah tersebut. setelah bencana. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana dan pemulihan bencana serta perencanaan aksi rekonstruksi dan disertai dengan pengawasan.
2. Kegiatan lainnya meliputi pemulihan keadaan darurat, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat secara memadai, serta rekonstruksi semua infrastruktur dan kelembagaan di daerah pascabencana. Pelibatan masyarakat dalam bentuk organisasi/lembaga dalam proses tanggap darurat dapat memberikan dukungan melalui posko tanggap bencana atau menyalurkan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana bencana dengan berkoordinasi dengan Komando Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Kegiatan peran serta masyarakat pada saat tanggap berupa:

1. Perlindungan dan pengurusan pengungsi.
2. Pemantauan pelaksanaan tanggap darurat.
3. Penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana.
4. Pencarian, penyelamatan, serta evakuasi.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk membantu markas tanggap darurat dalam penanggulangan bencana, komandan tanggap darurat dapat menempatkan perwakilan masyarakat, secara

individu atau kelompok, dalam struktur organisasi markas tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam tanggap darurat ini dapat melibatkan sektor/cluster penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat, individu dan organisasi/lembaga harus:

1. Berprinsip akuntabilitas.
2. Memperhatikan standar dan norma kemanusiaan.
3. Mematuhi asas, tujuan, serta standar minimum.
4. Menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama.

BNPB atau BPBD memfasilitasi pemberian perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Atas kebijakannya sendiri, BNPB atau BPBD menyediakan kemudahan dan kondisi lain yang menguntungkan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Fasilitasi dan kemudahan akses oleh BNPB atau BPBD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, individu dan organisasi harus dipantau dan diberi penghargaan untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. BNPB atau BPBD bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Tugas Wilayah (SKPD) memantau partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Individu dan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana wajib menyampaikan laporan kinerja operasional secara berkala, setelah kegiatan selesai atau sewaktu-waktu, kepada BNPB atau BPBD. Selain itu, individu dan

organisasi yang berjasa dapat diberi penghargaan atas partisipasi mereka dalam kegiatan penanggulangan bencana pemerintah atau pemerintah daerah. Pada akhir proses pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan pembelajaran dengan pemangku kepentingan penanggulangan bencana baik secara mandiri oleh BNPB maupun BPBD maupun didukung melalui forum konferensi, lokakarya, konsultasi teknis serta pendidikan dan pelatihan. Dalam hal aset hasil kegiatan penanggulangan bencana, BNPB atau BPBD dapat membantu individu dan organisasi dalam mengelola pengalihan kepemilikan properti sesuai dengan peraturan yang berlaku²³.

F. Pengendalian Banjir

a. Pengertian Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, eksploitasi dan pemeliharaan, yang pada dasarnya untuk mengendalikan banjir, pengaturan penggunaan daerah dataran banjir dan mengurangi atau mencegah adanya bahaya/kerugian akibat banjir²⁴.

b. Strategi Pengendalian Banjir

Strategi dalam pengendalian banjir diantaranya:

- 1) Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan)

²³<https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana> diakses tanggal 02 Januari 2022

²⁴ Octaviani, (2016), *Upaya masyarakat dalam mengurangi resiko banjir di Kelurahan kampung melayu, Jakarta timur*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

- 2) Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bantuan pengontrol (waduk) atau normalisasi sungai.
- 3) Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknis mitigasi seperti asuransi, penghindaran banjir (*flood profing*)
- 4) Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan.

1.6 Penelitian Terkait

Penelitian Aditianata (2015) tentang Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir di kelurahan duri Kosambi, Jakarta Barat, hasil penelitiannya menunjukkan dilakukannya pemetaan dan gambaran kondisi tentang drainase dan pengelolaan drainase, yang kemudian dilakukan rembug warga untuk menjelaskan temuan serta rencana kerja yang akan dilakukan dalam rangka penanganan banjir. Rembug warga dihadiri tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Hasil dari rembug warga ini berupa mitigasi bencana berupa area risiko bencana banjir dan area tidak terkena banjir²⁵.

Penelitian Fedryansyah (2019) tentang Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di desa Mekargalih kecamatan Jatinangor. Hasil penelitiannya bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana terdapat *local leader* atau aktor masyarakat yang terlibat yaitu ketua RT, ketua RW, dan komunitas lokal. Bentuk partisipasi masyarakat terbagi menjadi 5 yaitu partisipasi pikiran, keterampilan, tenaga, barang, dan uang. Adanya mitigasi

²⁵ Aditianata, 2015, *Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir di kelurahan duri Kosambi, Jakarta Barat, Jurnal Abdimas Volume 2 Nomor 1*

bencana banjir yang masyarakat lakukan dengan bergotong royong seperti membersihkan saluran air agar tidak tersumbat, membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir, dan memasang beton penyanggah agar air tidak mudah meluap²⁶.

Penelitian Lengkey, dkk (2020), Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. Hal 42 tentang Partisipasi masyarakat pada penanggulangan bencana banjir di kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, hasil penelitiannya Keterlibatan dalam perencanaan dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan pemerintah kecamatan dan secara tidak langsung melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. dukungan pemerintah dan organisasi sosial. Namun, ada juga masyarakat yang tidak ikut mengindahkan peraturan untuk tidak membangun bangunan di tepi pantai dan tidak mau pindah dari kawasan yang terendam banjir²⁷.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada operasional konsep, penelitian Aditianata menggunakan pengabdian masyarakat, penelitian Ferdiansah menggunakan model penanggulangan bencana berbasis masyarakat, penelitian Londa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir terdiri dari partisipasi rencana, dan partisipasi program sedangkan penelitian ini

²⁶ Fedryansyah, (2019), *Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di desa Mekargalih kecamatan Jatinangor*, Jurnal Universitas Padjajaran.

²⁷ Lengkey, Claudio T F, Masje Silija Pangkey, Very Yohanis Londa, (2020), *Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. Hal 42.

mengacu pada teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang terdiri dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.

Temuan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Tenggang dalam penanggulangan banjir pada Daerah Aliran Sungai Tenggang. Dapat dilihat dari teori manajemen bencana yang terdiri dari tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana masyarakat melakukan sosialisasi mandiri melalui pertemuan warga yang membahas tentang penanggulangan banjir dan sampah, tetapi masih ditemukan warga yang membuang sampah di sungai. Saat terjadi bencana warga berfokus pada pengungsian dan penyelamatan harta benda. Pasca bencana merupakan proses rehabilitasi terhadap anak-anak yang terdampak banjir. Adanya ketidaksesuaian antara program pemerintah berupa normalisasi dengan yang dirasakan warga juga menjadi pembahasan dalam temuan peneliti.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini operasional konsep peran masyarakat menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff diantaranya: Pengambilan keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan manfaat dan Evaluasi.

- a) Pengambilan keputusan, yaitu, mengidentifikasi alternatif dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai gagasan yang berkaitan dengan kebaikan bersama.
- b) Pelaksanaan, yaitu, memobilisasi sumber daya dan pendanaan. Kinerja peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan.

- c) Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas kinerja program yang dapat dicapai.
- d) Evaluasi, dikaitkan dengan pelaksanaan seluruh program. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut.

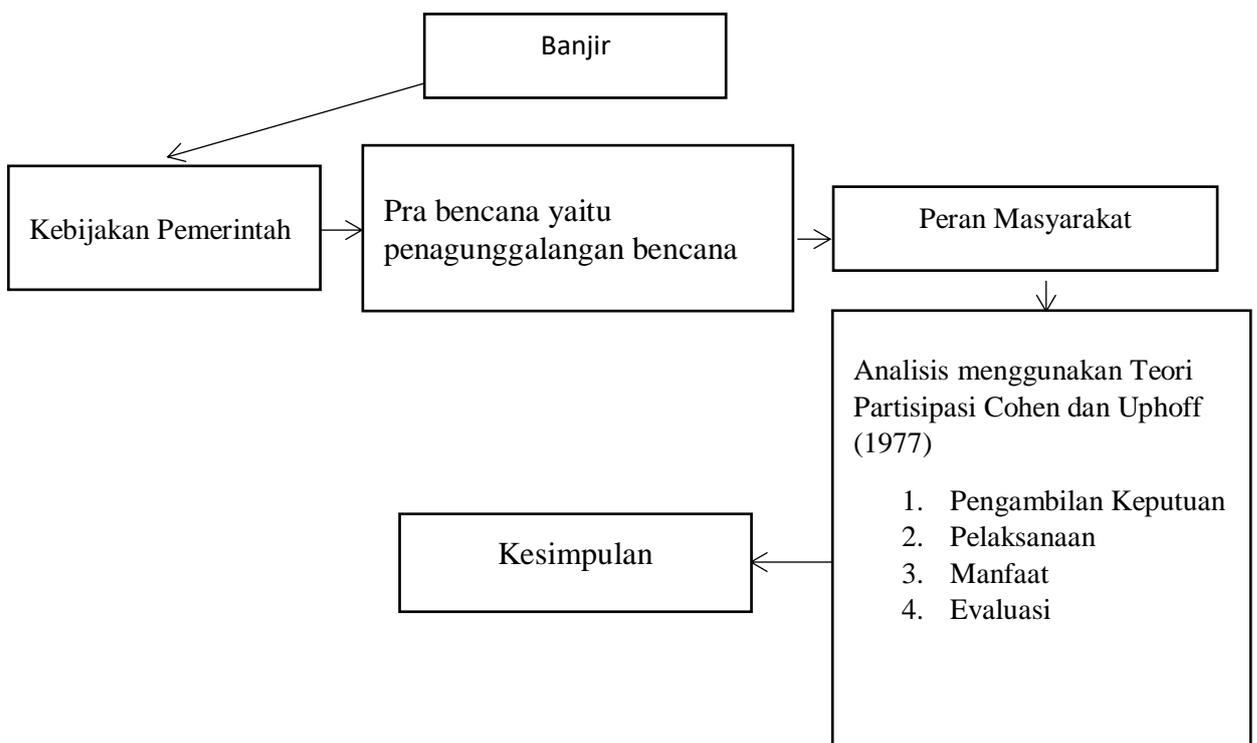
1.8 Kerangka Penelitian

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para korban bencana tersebut. Dampak kerugian akibat banjir cukup banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, antara lain: Kerusakan lahan pertanian, pemukiman penduduk, sarana dan prasarana serta kerusakan fisik lainnya. Bencana banjir dengan masyarakat terdapat hubungan yang saling berkaitan. Banjir, baik sebab maupun akibat, sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena alam dan manusia memiliki hubungan timbal balik, dampak dan pengaruh satu sama lain. Untuk menggali penyebab banjir di desa Tambakrejo kecamatan Gayamsari, penulis menggunakan data faktor-faktor penyebab banjir hingga menimbulkan bencana. Data yang dikumpulkan adalah data iklim, topografi, hidrologi, pengelolaan lahan, kependudukan dan upaya mitigasi.

Upaya penanggulangan bencana diharapkan tidak hanya dipimpin oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat berperan aktif untuk bersama-sama berupaya melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Dapat melakukan pendekatan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat untuk memahami manfaat penanggulangan bencana.

Partisipasi adalah ungkapan keikutsertaan seseorang/masyarakat dalam kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi dapat berupa saran, layanan, atau materi langsung atau tidak langsung. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada daerah rawan banjir sebagai upaya nyata penanggulangan bencana perlu diketahui. Mengingat wilayah Kelurahan Tambakrejo yang rawan banjir, pelaksanaan program penanggulangan bencana memerlukan dukungan partisipatif dari masyarakat Kelurahan Tambakrejo.

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau uraian atau gambaran atau deskripsi yang sistematis, akurat dan tepat tentang peristiwa, serta ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan secara deskriptif peran masyarakat dalam pengendalian banjir di DAS Tenggang Kecamatan Gayamsari Kelurahan Kaligawe Kota Semarang.

1.9.2 Situs penelitian

Mengingat keterbatasan yang dimiliki peneliti, peneliti memilih lokasi penelitian pada Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Kaligawe dan batasan tahun pada penelitian ini adalah tahun 2020. Lokasi tersebut dipilih karena banjir kerap kali melanda kawasan tersebut terutama pada musim penghujan. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan pendukung perekonomian. Tingkat mobilisasi cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kawasan tersebut merupakan jalur antar kota, merupakan wilayah industri, dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selain faktor mobilisasi, letak geografis Kecamatan Gayamsari yang berada di pesisir Kota Semarang dan berada disamping Sungai Banjir Kanal Timur juga menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini yang bisa memberikan jawaban rumusan masalah adalah Masyarakat DAS Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Tabel 1.3
Subjek Penelitian

No	Informan Kunci	Triangulasi
1.	Rudy Satriya (Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang)	Masyarakat DAS Tenggang 1. Abdul Rohman (Ketua RT:06 RW:07)
2.	Setyo Widiatmoko, S.H (Kepala Kelurahan Tambakrejo)	2. Iwan Susanto (Ketua RT:05 RW:07) 3. Deviana (Warga, LSM Sahabat Tenggang)

Sumber: Diolah peneliti.

Dalam tabel tersebut peneliti mengambil narasumber dari pihak pemerintahan kota sebanyak 1 orang, pemerintah desa sebanyak 1 orang, dan warga masyarakat sebanyak 3 orang.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang berbentuk teks yang dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian yang berasal dari informan yang ditetapkan peneliti melalui wawancara dan observasi.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber diantaranya:

a) Data primer

Adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dipelajari dan diamati sebagai hasil gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya. Data primer untuk penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan

masyarakat Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang sehubungan dengan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir di Daerah Aliran Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

b) Data sekunder

Adalah Data yang tidak langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Data dari Dinas Kependudukan Kota Semarang mengenai pertumbuhan jumlah penduduk.
2. Data dari BPBD Kota Semarang mengenai data kejadian bencana banjir

1.9.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu penelitian agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang dituju. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang fenomena penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang obyek penelitian secara langsung dari masyarakat Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

b) Observasi

Merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung. Data observasi ini didapat dengan melakukan observasi langsung ke lokasi beberapa titik banjir di Daerah Aliran Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

c) Dokumentasi

Merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir di Daerah Aliran Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pengujian data dalam penelitian ini peneliti akan merekam proses wawancara dan kemudian melakukan transkrip hasil wawancara tersebut ke dalam bentuk teks, untuk menambah validitas data atas kebenaran transkrip wawancara yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (1994) yaitu tiga langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif, Reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam prakteknya, langkah ini tidak dilakukan secara berurutan tetapi secara dinamis, disebut juga

dengan pemodelan interaksi karena proses-proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi data

Pada tahap ini, penulis meringkas, mengambil poin-poin penting, memfokuskan pada unsur-unsur penting, dan mencari tema dan pola. Pengurangan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data.

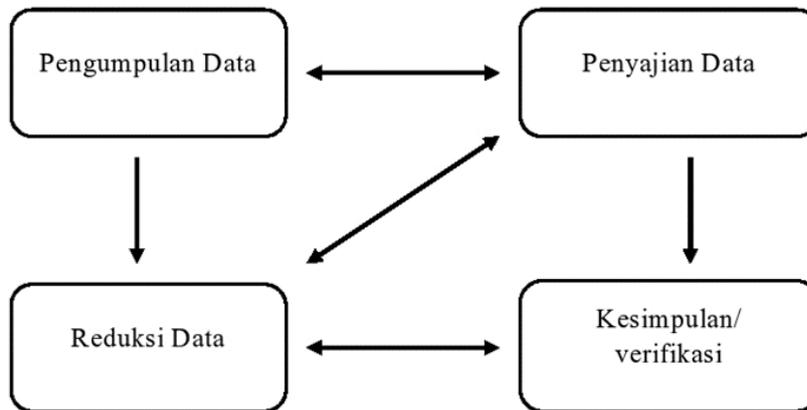
2. Paparan data

Menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur dan memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan terhadap pemahaman dan analisis penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab pertanyaan tentang objek penelitian melalui hasil analisis data. Temuan-temuan tersebut kemudian disajikan sebagai subjek studi deskriptif yang dipandu oleh studi.

Gambar 1.2
Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, 1994²⁸

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada kegiatan yang saling bergantung dan membentuk urutan yang tidak terisolasi. Penyajian data Selain pengurangan, proses pendataan juga harus direview untuk memastikan tidak ada data penting yang tertinggal. Begitu pula jika dalam proses verifikasi ternyata masih ada kesimpulan yang meragukan dan kebenaran maknanya tidak disepakati, kembali ke proses pengumpulan data.

1.9.8 Kualitas Data dan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dari lapangan bisa memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan pengecekan melalui:

- a) Perpanjangan Keikutsertaan

Keterlibatan peneliti sangat penting dalam pengumpulan data, sehingga perlu memperluas peneliti di lingkaran penelitian. Hal ini

²⁸ Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman., (1994), *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications Hal 12

akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang terkumpul. Ini juga memaksa peneliti untuk melakukan perjalanan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi dan memeriksa data yang dapat mencemari data. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data hingga tidak ditemukan data baru. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat menguji kebenaran informasi yang diperoleh secara distorsi baik berasal dari peneliti sendiri maupun dari subyek wawancara. Perpanjangan keikutsertaan ini dapat membangun kepercayaan antara subyek wawancara dengan peneliti, sehingga antara peneliti dengan informan kunci dapat menciptakan hubungan dekat yang baik dengan mudah mengungkapkan sesuatu secara transparan dan mengungkapkan ketulusan dan kejujuran.

b) Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan.